

## RINGKASAN SKRIPSI

Skripsi ini berjudul “Upaya Diplomasi Indonesia Dalam Memperbaiki Citra Kelapa Sawit Dari Adanya Upaya *Green Protectionism* Oleh Uni Eropa Tahun 2018-2022”. Skripsi ini membahas tentang upaya Indonesia selaku produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia, yang dalam proses ekspornya masih memiliki hambatan, terutama ke negara-negara Uni Eropa yang merupakan tujuan ekspor minyak kelapa sawit terbesar kedua setelah India. Adanya *black campaign* oleh Uni Eropa terhadap minyak kelapa sawit dan penyebaran informasi yang *misleading* terhadap industri kelapa sawit di Indonesia yang tidak berkelanjutan.

Selain itu, Uni Eropa juga berupaya untuk mengganti penggunaan minyak sawit dengan minyak unggulan domestiknya seperti *canola oil*, *rapeseed oil*, dan *sunflower oil* melalui aturan yang sistematis di bawah kerangka *European Green Deal* (EGD) seperti *Renewable Energy Directive* (RED) II, *Delegated Act* dan *EU Proposal For a Regulation on Deforestation and Forest Degradation-Free Commodities* (DFC). Sehingga, tindakan Uni Eropa tersebut dipandang sebagai bentuk diskriminasi yang berusaha melindungi produk minyak nabati domestiknya (*green protectionism*).

Upaya *green protectionis* tersebut menjadi hambatan besar bagi Indonesia karena menyangkut tentang perkembangan industri kelapa sawit yang menaungi hajat hidup orang banyak ke depannya, dimana telah menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat lokal, berkontribusi dalam peningkatan indeks pembangunan manusia, serta pembangunan ekonomi Produk Domestik Bruto (PDB).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan upaya diplomasi Indonesia dalam memperbaiki citra kelapa sawit dari adanya upaya *green protectionism* oleh Uni Eropa berdasarkan data yang tersedia di tahun 2018 hingga 2022. Penelitian ini menggunakan teori Diplomasi Publik dari Mark Leonard (2002), yang menjelaskan bahwa diplomasi publik merupakan suatu cara untuk membangun hubungan dengan negara lain melalui pemahamannya terhadap kebutuhan, budaya, dan masyarakat, serta untuk memperbaiki mispersepsi dalam masyarakat internasional, dimana aktivitas diplomasi publik suatu negara diklasifikasikan dalam tiga bidang, yang meliputi *news management*, *strategic communication*, dan *relationship building*.

Berdasarkan aktivitas diplomasi publik dalam tiga bidang tersebut, ditemukan bahwa selama periode 2018 hingga 2022, Indonesia telah melakukan berbagai upaya berupa keterlibatan dalam forum internasional, *Joint Working Group*, *international workshop*, pertukaran pelajar, program hilirisasi, serta promosi lewat media *film dokumenter*. Indonesia berhasil menjalin kerjasama dengan beberapa negara Uni Eropa yang tergabung dalam *European Free Trade Association* (EFTA) seperti Islandia, Liechtenstein, Norwegia dan Swiss, dimana negara-negara tersebut mau menerima komoditas kelapa sawit Indonesia yang saat ini tengah mengalami diskriminasi dari Uni Eropa. Hal tersebut membuktikan bahwa tidak semua negara di kawasan Uni Eropa menolak minyak sawit. Selain itu, Indonesia juga berhasil membuka pasar baru bagi ekspor CPO ke negara di luar Eropa seperti Turki.

Akan tetapi, diplomasi publik Indonesia juga belum bisa dikatakan membuahkan hasil yang maksimal, karena beberapa faktor penghambat seperti gagalnya pemerintah Indonesia dalam melobby APEC untuk memasukan perkebunan kelapa sawit sebagai kategori hutan, serta tidak diakuinya sertifikasi *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO) oleh Uni Eropa.

Saran untuk penelitian ini adalah Indonesia mesti mempercepat pengelolaan perkebunan kelapa sawit dalam negeri agar tersertifikasi secara merata di bawah ISPO (*Indonesian Sustainable Palm Oil*) secara transparan, dan terus melakukan diversifikasi pasar potensial bagi produk turunan kelapa sawit yang tidak berfokus pada pasar Uni Eropa saja.